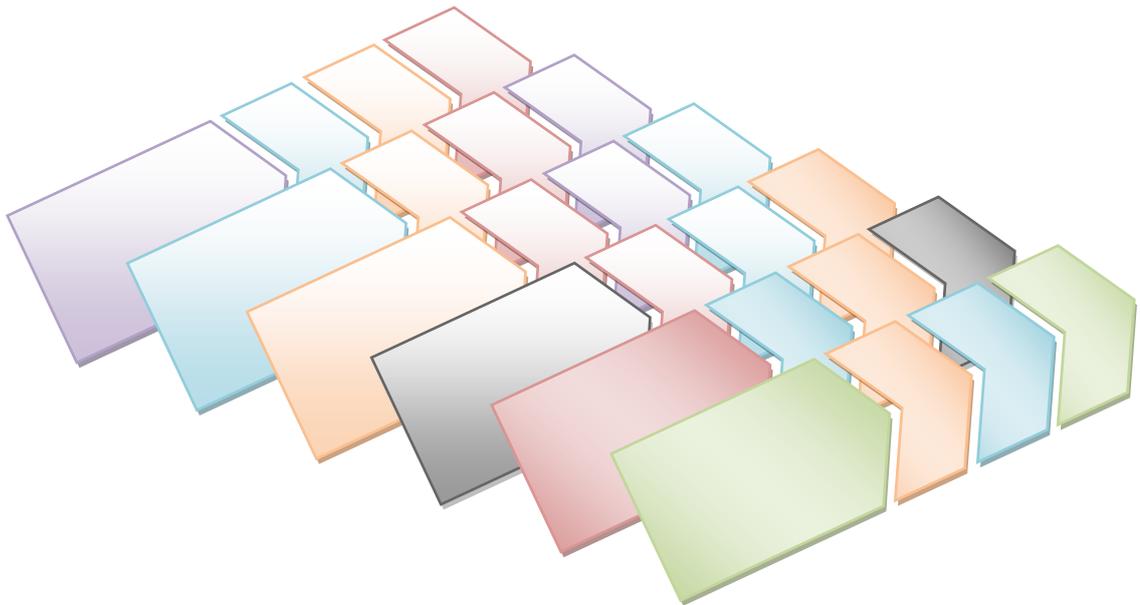


**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SULAWESI BARAT
018.09.3400.500957.KD**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**



Alamat Kantor :
Komplek Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju
SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Manuju, 10 Januari 2022,
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si.
NIP. 196807201994032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Penerimaan Bukan Pajak	14
B.2. Belanja	15
B.3. Belanja Pegawai	16
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	18
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
C.1. Aset Lancar	19
C.1.1. Persediaan	19
C.2. Aset Tetap	19
C.2.1. Tanah	19
C.2.2. Peralatan dan Mesin	19
C.2.3. Gedung dan Bangunan	20
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	20
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	20
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	20
C.3. Aset Lainnya	21
C.3.1. Aset Tak Berwujud	21
C.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	21
C.5. Ekuitas	
C.5. Ekuitas	22

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	22
D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22
D.2.	Beban Pegawai	22
D.3.	Beban Persediaan	23
D.4.	Beban Barang dan Jasa	23
D.5.	Beban Pemeliharaan	24
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	25
D.7.	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	25
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	26
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	27
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
E.1.	Ekuitas Awal	28
E.2.	Surplus/Defisit-LO	28
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	28
E.4.	Transaksi Antar Entitas	28
E.5.	Ekuitas Akhir	29
F.	Pengungkapan lainnya	30

DAFTAR LAMPIRAN

A. Laporan Pendukung dari e-rekon-lk

1. Berita Acara Rekonsiliasi (dan lampirannya) Laporan Realisasi Anggaran antara Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Bendahara Umum Negara sampai dengan periode Desember 2021 ;
2. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (dan lampirannya) antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat periode Semester II Tahun Anggaran 2021.

B. Laporan Pendukung dari Aplikasi SAIBA

1. Neraca Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2021;
2. Neraca Percobaan (Akrua) Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2021;
3. Neraca Percobaan (Kas) Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2021;
4. Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Laporan Operasional (Detail) Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Laporan Perubahan Ekuitas (Detail) Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
8. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja per tanggal 31 Desember 2021;
9. Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Belanja Satuan Kerja melalui KPPN per tanggal 31 Desember 2021;
10. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja per tanggal 31 Desember 2021;
11. Laporan Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan hibah per tanggal 31 Desember 2021;
12. Laporan Kinerja per tanggal 31 Desember 2021;
13. Daftar SPM dan SP2D (1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021).

A. Laporan Pendukung dari Aplikasi Simak BMN

1. Laporan Posisi Barang di Neraca Per tanggal 31 Desember 2021;
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Intrakomtabel Semester II tahun 2021;
3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Ekstrakomtabel Semester II tahun 2021;

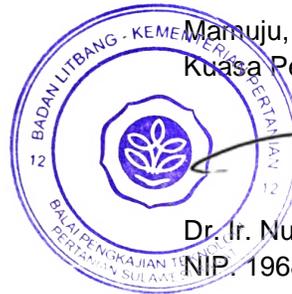
4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel Semester II tahun 2021;
 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna bersejarah Semester II tahun 2021;
 6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Semester II tahun 2021;
 7. Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan Semester II tahun 2021;
 8. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Intrakomtabel Semester II tahun 2021;
 9. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Ekstrakomtabel Semester II tahun 2021;
 10. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel Semester II tahun 2021;
 11. Laporan Barang Persediaan per Semester II tahun anggaran 2021;
 12. Laporan Barang hilang Semester II tahun 2021;
- B. Laporan Pendukung dari Aplikasi Persediaan
1. Laporan Posisi Barang di Neraca per tanggal 31 Desember 2021;
 2. Laporan Persediaan untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
- C. Lampiran lainnya
1. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2021;
 2. Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2021 ;
 3. Fotocopy Halaman terakhir BKU Bendahara Pengeluaran bulan Desember TA.2021;
 4. Fotocopy Bukti setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021 ;
 5. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan bulan Desember 2021;
 6. Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan Desember 2021;
 7. Fotocopy Halaman terakhir BKU Bendahara Penerimaan bulan Desember TA.2021;
 8. Berita Acara Rekon Internal Operator SAIBA dengan Bendahara Pengeluaran;
 9. Berita Acara Rekon Internal Operator SAIBA dengan Bendahara Penerimaan;
 10. Berita Acara Rekon Internal Operator SAIBA dengan Operator Simak BMN;
 11. Berita Acara Rekon Internal Operator SAIBA dengan Operator Aplikasi Persediaan;
 12. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan akhir bulan Desember TA.2021;
 13. Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang terdiri dari :
(a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Manuju, 10 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Sulawesi Barat Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp83,630,050.00 atau mencapai 126.71% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp66,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp6,889,453,920.00 atau mencapai 95.64% dari alokasi anggaran sebesar Rp7,203,201,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp12,061,347,440.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp59,325,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11,952,322,440.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp49,700,000.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp12,061,347,440.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83,445,000.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7,559,204,475.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7,475,759,475.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp138,762,550.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7,336,996,925.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp12,592,520,495.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7,336,996,925.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6,805,823,870.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp12,061,347,440.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP SULAWESI BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	66,000,000.00	83,630,050.00	126.71	183,204,500.00
Jumlah Pendapatan		66,000,000.00	83,630,050.00	126.71	183,204,500.00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	2,083,100,000.00	2,019,672,034.00	96.96	2,153,055,323.00
Belanja Barang	B.4.	5,020,101,000.00	4,770,781,886.00	95.03	4,264,817,109.00
Belanja Modal	B.5.	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00	450,752,886.00
Jumlah Belanja		7,203,201,000.00	6,889,453,920.00	95.64	6,868,625,318.00

II. NERACA

**BPTP SULAWESI BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	59,325,000.00	34,710,000.00
Jumlah Aset Lancar		59,325,000.00	34,710,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	375,560,000.00	375,560,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6,030,945,394.00	5,931,945,394.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	11,248,998,000.00	11,248,998,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	180,680,000.00	180,680,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	106,183,200.00	106,183,200.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-5,990,044,154.00	-5,335,256,099.00
Jumlah Aset Tetap		11,952,322,440.00	12,508,110,495.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	61,373,573.00	61,373,573.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-11,673,573.00	-11,673,573.00
Jumlah Aset Lainnya		49,700,000.00	49,700,000.00
Jumlah Aset		12,061,347,440.00	12,592,520,495.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban		0.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	12,061,347,440.00	12,592,520,495.00
Jumlah Ekuitas		12,061,347,440.00	12,592,520,495.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		12,061,347,440.00	12,592,520,495.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTP SULAWESI BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	83,445,000.00	182,649,500.00
JUMLAH PENDAPATAN		83,445,000.00	182,649,500.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,019,672,034.00	2,153,055,323.00
Beban Persediaan	D.3.	833,719,500.00	561,652,000.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,451,387,508.00	2,989,709,451.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	375,499,500.00	397,564,249.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	741,187,878.00	453,986,409.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	386,950,000.00	2,548,000,000.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	96,000,000.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	654,788,055.00	670,542,239.00
JUMLAH BEBAN		7,559,204,475.00	9,774,509,671.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7,475,759,475.00	-9,591,860,171.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	138,762,550.00	36,030,000.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		138,762,550.00	36,030,000.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-7,336,996,925.00	-9,555,830,171.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	12,592,520,495.00	15,462,432,848.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7,336,996,925.00	-9,555,830,171.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	497,000.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0.00	497,000.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	6,805,823,870.00	6,685,420,818.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-531,173,055.00	-2,869,912,353.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	12,061,347,440.00	12,592,520,495.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Sulawesi Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 66/Permentan/OT.140/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP Sulawesi Barat, mempunyai tugas pokok antara lain: 1) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 2) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi, 3) Melaksanakan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan, 4) Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 5) Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi, dan 6) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Sulawesi Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Sulawesi Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	66,000,000.00	66,000,000.00
Jumlah Pendapatan	66,000,000.00	66,000,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,083,100,000.00	2,083,100,000.00
Belanja Barang Operasional	73,892,000.00	71,892,000.00
Belanja Barang Non Operasional	3,666,956,000.00	2,012,916,000.00
Belanja Barang Persediaan	1,344,096,000.00	719,760,000.00
Belanja Jasa	410,400,000.00	490,600,000.00
Belanja Pemeliharaan	380,133,000.00	380,133,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,183,500,000.00	744,800,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	504,000,000.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	96,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,200,000,000.00	100,000,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,000,000,000.00	0.00
Jumlah Belanja	27,342,077,000.00	7,203,201,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83,630,050.00 atau mencapai 126.71% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp66,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Lain-Lain	0.00	185,050.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	66,000,000.00	83,445,000.00	126.43
Jumlah	66,000,000.00	83,630,050.00	126.71

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -54.35% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	16,812,000.00	- 100.00
Pendapatan Lain-Lain	185,050.00	555,000.00	-66.66
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	83,445,000.00	165,837,500.00	-49.68
Jumlah	83,630,050.00	183,204,500.00	-54.35

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp6,889,453,920.00 atau 95.64% dari anggaran belanja sebesar Rp7,203,201,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	2,083,100,000.00	2,021,512,349.00	97.04
Belanja Barang	5,020,101,000.00	4,770,781,886.00	95.03
Belanja Modal	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00
Total Belanja Kotor	7,203,201,000.00	6,891,294,235.00	95.67
Pengembalian Belanja		-1,840,315.00	0.00

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Total Belanja	7,203,201,000.00	6,889,453,920.00	95.64

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.30% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya revisi penambahan pagu dan realisasi Belanja Barang TA 2021

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	2,019,672,034.00	2,153,055,323.00	-6.20
Belanja Barang	4,770,781,886.00	4,264,817,109.00	11.86
Belanja Modal	99,000,000.00	450,752,886.00	-78.04
Total Belanja	6,889,453,920.00	6,868,625,318.00	0.30

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,019,672,034.00 dan Rp2,153,055,323.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -6.20% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya anggaran belanja lembur pegawai TA.2021 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
2. Adanya beberapa pegawai yang pensiun pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,021,512,349.00	2,123,008,520.00	-4.78
Belanja Lembur	0.00	30,407,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	2,021,512,349.00	2,153,415,520.00	-6.13
Pengembalian Belanja Pegawai	-1,840,315.00	-360,197.00	410.92
Jumlah Belanja	2,019,672,034.00	2,153,055,323.00	-6.20

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4,770,781,886.00 dan Rp4,264,817,109.00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11.86% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pagu pada akun belanja barang pesediaan TA 2021.
2. Adanya penambahan anggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda TA.2021.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	71,892,000.00	668,650,000.00	-89.25
Belanja Barang Non Operasional	2,001,848,000.00	1,906,983,520.00	4.97
Belanja Barang Persediaan	719,757,000.00	430,207,000.00	67.30
Belanja Jasa	377,647,508.00	407,425,931.00	-7.31
Belanja Pemeliharaan	375,499,500.00	397,564,249.00	-5.55
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	741,187,878.00	453,986,409.00	63.26
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	386,950,000.00	0.00	0.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	96,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	4,770,781,886.00	4,264,817,109.00	11.86
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	4,770,781,886.00	4,264,817,109.00	11.86

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp99,000,000.00 dan Rp450,752,886.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -78.04% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengurangan pagu pada akun Belanja Modal TA 2021 dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,000,000.00	289,752,886.00	-65.83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	161,000,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	99,000,000.00	450,752,886.00	-78.04
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	99,000,000.00	450,752,886.00	-78.04

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp99,000,000.00 dan Rp289,752,886.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -65.83% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya pengurangan pagu pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dari tahun sebelumnya

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,000,000.00	289,752,886.00	-65.83
Jumlah Belanja Kotor	99,000,000.00	289,752,886.00	-65.83
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	99,000,000.00	289,752,886.00	-65.83

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp59,325,000.00 dan Rp34,710,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bahan Baku	59,325,000.00	34,710,000.00
Jumlah	59,325,000.00	34,710,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp375,560,000.00 dan Rp375,560,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,030,945,394.00 dan Rp5,931,945,394.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	5,931,945,394.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	99,000,000.00
Saldo per 31 Desember 2021	6,030,945,394.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-5,154,976,299.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	875,969,095.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Adanya transaksi pembelian peralatan dan mesin antara bulan 01 Jan – 30 September 2021:

- Tenda Sedang 50 Unit Rp. 69,000,000
- Tenda Besar 3 Unit Rp. 30,000,000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11,248,998,000.00 dan Rp11,248,998,000.00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp180,680,000.00 dan Rp180,680,000.00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp106,183,200.00 dan Rp106,183,200.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-5,990,044,154.00 dan Rp-5,335,256,099.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6,030,945,394.00	-5,154,976,299.00	875,969,095.00
2.	Gedung dan Bangunan	11,248,998,000.00	-807,965,858.00	10,441,032,142.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	180,680,000.00	-27,101,997.00	153,578,003.00
4.	Aset Tetap Lainnya	106,183,200.00	0.00	106,183,200.00
Akumulasi Penyusutan		17,566,806,594.00	-5,990,044,154.00	11,576,762,440.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp61,373,573.00 dan Rp61,373,573.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	49,700,000.00
Software	11,673,573.00
Jumlah	61,373,573.00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Sulawesi Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-11,673,573.00 dan Rp-11,673,573.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	61,373,573.00	-11,673,573.00	49,700,000.00
	Akumulasi Penyusutan	61,373,573.00	-11,673,573.00	49,700,000.00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12,061,347,440.00 dan Rp12,592,520,495.00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83,445,000.00 dan Rp182,649,500.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	83,445,000.00	165,837,500.00	-49.68
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0.00	16,812,000.00	-100.00
Jumlah	83,445,000.00	182,649,500.00	-54.31

Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 sebesar Rp83,445,000.00 diperoleh dari hasil penjualan benih kegiatan UPBS Per 31 Desember 2021.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,019,672,034.00 dan Rp2,153,055,323.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,323,343,000.00	1,430,616,880.00	-7.50
Beban Pembulatan Gaji PNS	21,381.00	22,186.00	-3.63
Beban Tunj. Anak PNS	21,965,820.00	23,955,202.00	-8.30
Beban Tunj. Beras PNS	65,829,780.00	61,484,580.00	7.07
Beban Tunj. Fungsional PNS	259,320,000.00	186,610,000.00	38.96
Beban Tunj. PPh PNS	10,407,783.00	8,713,811.00	19.44

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun)
			%
Beban Tunj. Struktural PNS	32,760,000.00	32,400,000.00	1.11
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68,411,520.00	77,997,664.00	-12.29
Beban Tunjangan Umum PNS	18,339,750.00	43,950,000.00	-58.27
Beban Uang Lembur	0.00	30,407,000.00	-100.00
Beban Uang Makan PNS	219,273,000.00	256,898,000.00	-14.65
Jumlah	2,019,672,034.00	2,153,055,323.00	-6.20

Realisasi Beban Pegawai TA 2021 turun sebesar 6.20%. dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena tidak terealisasinya uang lembur pegawai TA.2021 akibat pengurangan pagu pada BPTP Sulbar serta adanya pengurangan jumlah PNS karena telah pensiun

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp833,719,500.00 dan Rp561,652,000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun)
			%
Beban Persediaan bahan baku	439,483,500.00	131,445,000.00	234.35
Beban Persediaan konsumsi	394,236,000.00	430,207,000.00	-8.36
Jumlah	833,719,500.00	561,652,000.00	48.44

Realisasi Beban Persediaan TA 2021 naik sebesar 48.44%. dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena adanya penambahan pagu anggaran belanja persediaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2021

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,451,387,508.00 dan Rp2,989,709,451.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0.00	6,650,000.00	-100.00
Beban Bahan	584,936,000.00	154,762,950.00	277.96
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	587,730,000.00	0.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	801,682,000.00	1,709,320,570.00	-53.10
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,692,000.00	93,250,000.00	-88.53
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,200,000.00	53,400,000.00	14.61
Beban Honor Output Kegiatan	27,500,000.00	42,900,000.00	-35.90
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	143,209,000.00	112,225,000.00	27.61
Beban Jasa Profesi	5,000,000.00	13,600,000.00	-63.24
Beban Keperluan Perkantoran	0.00	522,000,000.00	-100.00
Beban Langganan Listrik	176,262,232.00	226,938,056.00	-22.33
Beban Langganan Telepon	53,176,276.00	53,537,875.00	-0.68
Beban Sewa	0.00	1,125,000.00	-100.00
Jumlah	2,451,387,508.00	2,989,709,451.00	-18.01

Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2021 turun sebesar 18.01%. dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu akun belanja barang dan jasa TA 2021.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp375,499,500.00 dan Rp397,564,249.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105,742,000.00	105,867,000.00	-0.12
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	17,500,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	11,960,000.00	11,985,000.00	-0.21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	257,797,500.00	262,212,249.00	-1.68
Jumlah	375,499,500.00	397,564,249.00	-5.55

Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 turun sebesar 5.55% dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu belanja untuk pemeliharaan TA 2021

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp741,187,878.00 dan Rp453,986,409.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	521,474,078.00	422,890,009.00	23.31
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	206,403,800.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,310,000.00	21,420,000.00	-37.86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	9,676,400.00	-100.00
Jumlah	741,187,878.00	453,986,409.00	63.26

Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2021 naik sebesar 63.26%. dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena adanya penambahan pagu belanja kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2021.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp482,950,000.00 dan Rp2,548,000,000.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	386,950,000.00	0.00	0.00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	96,000,000.00	0.00	0.00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	320,600,000.00	-100.00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	79,900,000.00	-100.00
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	2,147,500,000.00	-100.00
Jumlah	482,950,000.00	2,548,000,000.00	-81.05

Realisasi Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2021 turun sebesar 81.05%. dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena adanya pengurangan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat TA.2021.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp654,788,055.00 dan Rp670,542,239.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	235,985,872.00	234,163,182.00	0.78
Beban Penyusutan Irigasi	6,022,666.00	6,022,666.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	412,779,517.00	430,356,391.00	-4.08
Jumlah	654,788,055.00	670,542,239.00	-2.35

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 turun sebesar 2.35%. dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena tidak adanya penambahan peralatan dan mesin yang signifikan pada TA 2021.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	138,577,500.00	35,475,000.00	290.63
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185,050.00	555,000.00	-66.66
Jumlah	138,762,550.00	36,030,000.00	285.13

Realisasi Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 naik sebesar 285.13 dari realisasi TA 2020, ini disebabkan karena adanya penambahan pendapatan perolehan aset lainnya berupa benih dari tahun sebelumnya.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12,592,520,495.00 dan Rp15,462,432,848.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-7,336,996,925.00 dan Rp-9,555,830,171.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp497,000.00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp497,000.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,805,823,870.00 dan Rp6,685,420,818.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,889,453,920.00
Diterima dari Entitas Lain	-83,630,050.00
Jumlah	6,805,823,870.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-83,630,050.00 sedangkan DKEL sebesar Rp6,889,453,920.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-531,173,055.00 dan Rp-2,869,912,353.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Penggunaan Anggaran Penanganan Covid dan PEN

Terdapat realisasi penggunaan anggaran belanja untuk Penanganan Covid sebesar Rp70,301,000 dan realisasi anggaran belanja PEN sebesar Rp1,264,793,000 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja penanganan Covid dan PEN
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Realisasi Penanganan Covid	Realisasi PEN
1.	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,692,000	-
	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	59,609,000	-
2.	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	587,730,000
3.	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	387,060,000
4.	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	83,600,000
5.	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	206,403,000
	Total	70,301,000	1,264,793,000